

Analisis Buruknya Fasilitas Pendidikan sebagai Dampak dari Penyalahgunaan Dana BOS

Rusli Dedi Mustofa^{1*}, Rahmawan Candra Mualim², Irawan Sukma³, Beny Dwi Lukitoaji⁴

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta

¹ruslidedidedi@gmail.com*, ²rahmawancandramualim@gmail.com, ³irawansukma24@gmail.com,

⁴beny@upy.ac.id

Kata-kata kunci:

Kata kunci 1; Dana BOS
 Kata kunci 2; kualitas pendidikan
 Kata kunci 3; transparansi
 Kata kunci 4; akuntabilitas

: ABSTRAK

Tuntutan zaman yang semakin maju memacu lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitasnya, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemerataan pendidikan melalui pembebasan biaya bagi siswa kurang mampu. Dana ini dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pengajaran. Namun, penyalahgunaan dana BOS oleh oknum tertentu, termasuk tenaga pendidik, telah menimbulkan dampak serius. Praktik korupsi, seperti manipulasi data dan laporan keuangan, menyebabkan dana yang seharusnya dialokasikan untuk fasilitas dan kebutuhan sekolah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Penyalahgunaan ini berdampak negatif pada kualitas pendidikan, dengan banyak sekolah gagal menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga menghambat proses pembelajaran siswa. Selain itu, kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan menggerus nilai moral di lingkungan sekolah. Dampaknya juga meluas ke kerugian finansial bagi negara dan masyarakat, sekaligus memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak penyalahgunaan dana BOS terhadap kualitas pendidikan. Hasil kajian menunjukkan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan, memperkuat akuntabilitas, dan memberikan sanksi tegas bagi pelaku korupsi. Dengan pengelolaan dana yang lebih baik, BOS dapat kembali menjadi instrumen utama dalam menciptakan pendidikan yang merata, berkualitas, dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Keywords:

Keyword 1; BOS fund
 Keyword 2; educational quality
 Keyword 3; transparency
 Keyword 4; accountability

ABSTRACT

The demands of an increasingly advanced era drive educational institutions to improve their quality, both through formal and non-formal education. The School Operational Assistance (BOS) fund serves as one of the government's efforts to promote equitable education by exempting fees for underprivileged students. This fund is managed independently by schools based on the principles of transparency, accountability, and professionalism and is directed toward improving the quality of facilities and teaching. However, the misuse of BOS funds by certain individuals, including educators, has caused serious impacts. Corrupt practices, such as data manipulation and falsification of financial reports, have led to the misallocation of funds intended for school facilities and needs for personal gain. This misuse negatively impacts the quality of education, with many schools failing to provide adequate infrastructure, thereby hindering the learning process for students. Moreover, such cases erode public trust in educational institutions and undermine moral values within schools. The

repercussions also extend to financial losses for the government and society, while exacerbating the educational gap between developed and underdeveloped regions. This study employs a literature review method to analyze the impact of BOS fund misuse on educational quality. The findings indicate the necessity of strategic measures to enhance oversight, strengthen accountability, and impose strict sanctions on perpetrators of corruption. With better fund management, BOS can once again serve as a primary instrument for achieving equitable, high-quality education and supporting the realization of national education goals.

Pendahuluan

Tuntutan zaman yang serba maju menjadi tantangan bagi lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal untuk mengembangkan kualitas pendidikan yang diberikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu indikator majunya pengelolaan manajemen yang dilakukan masyarakat sekolah. Adanya pengelolaan manajemen bertujuan untuk memperbaiki sistem-sistem yang belum bekerja secara maksimal dengan menggunakan dana BOS yang dianggarkan oleh pemerintah sebagai modal untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada.

Pemerataan pendidikan bagi semua warga negara diupayakan pemerintah melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar 12 Tahun.

Dana BOS diterima oleh sekolah dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan MBS dalam Juknis BOS Ditjen Dikdas yang menyatakan bahwa sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 tahunan; sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut; Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/kota untuk sekolah negeri atau Yayasan untuk sekolah swasta (Muryati, 2016).

Namun, kenyataannya ada saja oknum-oknum yang menyalahgunakan dana BOS untuk kepentingan perutnya saja. Bahkan, tidak sedikit dari pelaku korupsi dana BOS adalah tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang seenaknya melakukan manipulasi data terhadap dana BOS yang bersumber dari pemerintah melalui APBN.

Penyalahgunaan dana BOS dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi sistem pendidikan Indonesia. Dampak pertama adalah terhambatnya kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Sekolah yang seharusnya meningkatkan sarana dan prasarana atau meningkatkan kualitas pengajaran justru gagal melakukannya karena dana yang ada disalahgunakan. Selain itu, penyalahgunaan dana juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Indonesia (Hidayati, 2024).

Hal tersebut membuktikan bahwa tindak pidana korupsi di sekolah sudah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan, dimana sekolah seharusnya menjadi tempat anak-anak generasi penerus bangsa mendapat pendidikan akademik dan moral dari tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik untuk berperilaku jujur, memiliki integritas tinggi dan belajar mengenai pentingnya sikap kepatuhan hukum. Ditambah dana yang diselewengkan merupakan dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan bagi kebutuhan sekolah seperti pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sampai pemenuhan kebutuhan alat multimedia untuk mendukung kegiatan belajar mengajar (Mauludi, 2023).

Berdasarkan narasi di atas, penulis berpendapat bahwa kasus korupsi dana BOS sangat mempengaruhi perkembangan sekolah terkait dan berdampak pada keberlangsungan proses pembelajaran. Di sisi lain, minusnya kepercayaan pemerintah kepada sekolah yang terkena kasus

penyalahgunaan dana BOS akan mempersulit jalan pihak sekolah untuk mengembangkan kualitas dari fasilitas pendidikan karena ada pembatasan atau pemblokiran dana BOS di masa mendatang.

Metode

Jenis penelitian ini adalah studi literatur, yang melibatkan serangkaian kegiatan terkait pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Septiana et al., 2022). Artikel ini menggunakan sumber data dari dokumen lain yang mendukung penulisan, seperti artikel, majalah, dan dokumen lain terkait objek penelitian serta proses pengumpulan data berlangsung melalui beberapa jurnal artikel yang diakses lewat Google Cendekia. Metode analisis data berbentuk analisis isi dan analisis data sekunder, yang berarti menggunakan sumber sekunder untuk menarik kesimpulan dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk artikel ini (Hartanto & Dani, 2020).

Hasil dan pembahasan

Pendidikan memiliki peran penting terhadap keberhasilan manusia di masa depannya. Pendidikan membantu setiap manusia untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Agar potensi-potensi tersebut dapat dioptimalkan, maka setiap manusia dapat memilih jalur pendidikan yang ingin mereka tempuh. Pendidikan dapat diselenggarakan baik dalam jalur formal, informal, maupun nonformal. Ketiga jenis pendidikan tersebut memiliki perannya masing-masing dalam membentuk manusia menjadi pribadi yang berilmu dan beradab. Adapun bentuk pendidikan di jalur formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan di Lembaga-lembaga pendidikan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sementara itu, pendidikan di jalur nonformal meliputi Lembaga-lembaga kursus, dan Lembaga informal adalah lingkungan keluarga, sebab keluarga memiliki peran juga dalam memberikan pendidikan untuk anak-anaknya (Astuti, 2017).

A. Hakikat Pendidikan

Istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberinya awalan “pe” dan akhiran “an” yang mengandung arti “perbuatan”. Definisi pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu “paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan. Istilah lain “Ta’lim” yang berarti pengajaran dan “ta’dib” yang berarti melatih.

Dalam perkembangannya istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak untuk memberikan stimulus terhadap pola pikirnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan peserta didik untuk memimpin perkembangan potensi jasmani dan rohaninya ke arah kesempurnaannya (Daulai, 2022).

Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan adalah segala usaha dari orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyokong kemajuan hidupnya. Berbeda dengan pendapat ahli pendidikan pada umumnya, Ki Hajar Dewantara memberikan definisi tentang pendidikan secara singkat namun memiliki makna yang luas. Di dalam definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terdapat kata “tuntunan”, ini bisa berarti acuan dasar untuk

bisa melakukan sesuatu, tuntunan ini tentu tidak bersifat hanya sekali pakai, tapi bisa digunakan berkali-kali ketika diperlukan (Marwah, S. S., Syafe'i, M., & Sumarna, 2018).

Di sisi lain, John Dewey memandang pendidikan sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut tentang kemampuan berpikir (intelektual) maupun daya perasaan (emosional) untuk menuju ke arah tabiat manusia yang sesungguhnya. John Dewey menyatakan pendidikan sebagai penataan ulang atau rekonstruksi aneka pengalaman dan peristiwa yang dialami dalam kehidupan individu sehingga segala sesuatu yang baru menjadi lebih terarah dan bermakna. Definisi ini berarti bahwa seorang berpikir tentang pengalaman-pengalaman yang dilaluinya sepanjang hayatnya (Arifin, 2020).

Pendidikan pada dasarnya adalah proses untuk menghasilkan sesuatu yang dapat mengarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan mempunyai disiplin tinggi. Rumusan pendidikan yang dikemukakan Ibnu Khaldun merupakan hasil dari berbagai pengalaman yang dilaluinya sebagai seorang ahli filsafat dan sosiologi yang mencoba menghubungkan antara konsep dan realita.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan berpijak pada konsep dan pendekatan filosofis-empiris. Melalui pendekatan ini, ia memberikan arahan terhadap visi tujuan pendidikan secara ideal dan praktis. Menurut Ibnu Khaldun ada tiga tingkatan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pendidikan, yaitu: Pengembangan kemahiran (*al-malakah* atau *skill*) dalam bidang tertentu; Penguasaan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan zaman; Pembinaan pemikiran yang baik (Hidayat, 2019).

B. Urgensi dari Ketersediaan Fasilitas Pendidikan yang Memadai

Sarana dan prasarana pendidikan berperan penting dalam menentukan kualitas serta aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan telah menjadi isu yang semakin mendesak di penjuru dunia, terutama di negara-negara berkembang. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kesenjangan yang masih ada dalam distribusi dan kualitas sarana serta prasarana pendidikan menyoroti kebutuhan akan upaya lebih lanjut untuk mencapai pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua individu (M. Annisa dkk., 2016). Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi adalah adanya ketidakseimbangan antara di daerah kota dan desa dalam hal akses terhadap sarana pendidikan yang memadai. Daerah pedesaan sering kali mengalami keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan, termasuk kurangnya sekolah yang berkualitas, sarana transportasi yang memadai, serta akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Ketidakmerataan ini dapat memperdalam divisi sosial dan ekonomi, dengan konsekuensi jangka panjang yang merugikan bagi pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif (Putri dkk., 2023).

Selain itu, kualitas sarana dan prasarana pendidikan juga memiliki dampak langsung terhadap partisipasi dan prestasi siswa di sekolah. Infrastruktur yang kurang memadai dapat menjadi hambatan dalam proses belajar-mengajar, mengurangi motivasi siswa, dan menghambat kemampuan mereka untuk mencapai potensi penuh. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur pendidikan guna menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merangsang. Melalui fasilitas yang memadai, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif, interaktif, dan inklusif, yang pada gilirannya akan meningkatkan pencapaian akademik dan pengembangan pribadi peserta didik (Anugrahwati dkk., 2022).

Sekolah Dasar (SD) adalah tahap awal dalam perjalanan pendidikan formal seorang anak. Pada tingkat ini, fondasi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai moral ditanamkan. Sekolah dasar, sebagai tahap awal dalam sistem pendidikan formal, berperan sangat penting dalam membentuk fondasi pendidikan bagi individu. Ini adalah periode kritis di mana anak-anak mulai membangun dasar pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang akan membimbing mereka sepanjang kehidupan. Sekolah dasar tidak hanya sebagai wadah siswa belajar membaca, menulis, dan berhitung, akan tetapi lingkungan di mana mereka mulai mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan kreatif yang penting (Sutaryo & Arumbi, 2017). Selain itu, sekolah dasar juga menjadi titik awal untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan khusus siswa, memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang sesuai untuk mencapai kesuksesan akademis dan sosial. Inklusi pendidikan, yang menekankan pentingnya menyediakan pendidikan bagi semua individu tanpa memandang perbedaan, menjadi prinsip yang sangat penting dalam lingkungan sekolah dasar (Alwi dkk., 2019). Meskipun peran yang penting, sekolah dasar di banyak negara masih menghadapi sejumlah tantangan. Mulai dari kekurangan dana dan fasilitas sarana dan prasarana fisik yang tidak memadai hingga kurangnya guru yang berkualifikasi, tantangantantangan ini dapat menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan dasar. Namun, di tengah tantangan tersebut, juga terdapat peluang untuk melakukan inovasi dan perbaikan yang signifikan. Penerapan teknologi pendidikan, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa kini, dan penguatan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan beberapa contoh sarana untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dasar (Triayomi dkk., 2023).

Oleh sebab itu, penting bagi setiap SD untuk memberikan lingkungan belajar yang kondusif dan sarana prasarana pendidikan yang memadai. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan bahwa tidak semua SD di wilayah Indonesia memiliki sarana dan prasarana yang memadai demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Salah satu wilayah yang menghadapi tantangan dalam sektor pendidikan adalah Bangkalan. Meskipun memiliki beberapa SD Negeri yang berperan penting dalam menyediakan pendidikan dasar bagi anak-anak di daerah tersebut, namun masih banyak yang mengalami kendala dalam hal ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai (Umasangadji, 2015).

C. Dampak Penyalahgunaan Dana BOS

Menurut Pendapat dari, (Rismanda, A. S., & Subandoro, A., 2021) Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek dalam dunia pendidikan, terutama bagi sekolah, siswa, dan masyarakat. Secara umum, dampak negatif ini berkaitan dengan hilangnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penyalahgunaan ini tidak hanya menghambat pengadaan fasilitas pendidikan yang layak, tetapi juga menciptakan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan negara. Selain itu, praktik korupsi dan manipulasi dana BOS dapat merusak citra institusi pendidikan, mengikis kepercayaan masyarakat, serta memberikan teladan buruk kepada siswa terkait nilai-nilai etika dan moral. Sebagai akibatnya, penyalahgunaan dana BOS memperlebar kesenjangan sosial, menurunkan motivasi belajar siswa, dan menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional.

1. Dampak terhadap Kualitas Pendidikan

Salah satu dampak paling nyata dari penyalahgunaan dana BOS adalah terganggunya proses pendidikan di sekolah. Dana yang semestinya digunakan untuk meningkatkan fasilitas belajar, seperti pengadaan buku pelajaran, komputer, atau perbaikan infrastruktur sekolah, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menyebabkan para siswa belajar dalam kondisi yang kurang layak, seperti ruang kelas yang rusak, minimnya alat peraga pendidikan, atau kurangnya akses ke teknologi. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa alokasi dana yang tidak efektif menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di lapangan, sehingga berdampak langsung pada kualitas proses belajar-mengajar (Julantika et al., 2017).

2. Kerugian Keuangan Negara dan Masyarakat

Selain itu, penyalahgunaan dana BOS menciptakan kerugian ekonomi baik bagi negara maupun masyarakat. Ketika dana ini diselewengkan, seperti melalui manipulasi laporan keuangan atau proyek fiktif, keuangan negara yang dialokasikan untuk pendidikan menjadi sia-sia. Hal ini memaksa pemerintah mengeluarkan dana tambahan untuk menutupi kekurangan, yang pada akhirnya membebani anggaran negara. Lebih parah lagi, masyarakat, khususnya orang tua siswa, harus menanggung dampaknya dengan mengeluarkan biaya tambahan untuk menutupi kekurangan fasilitas sekolah yang seharusnya ditutupi oleh dana BOS (Amelia et al., 2023).

3. Erosi Kepercayaan terhadap Institusi Pendidikan

Dampak berikutnya adalah penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Kasus penyalahgunaan dana BOS yang terungkap di media massa sering kali menimbulkan persepsi negatif terhadap pengelola sekolah dan pihak terkait lainnya. Kepercayaan ini sangat penting untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pendidikan, seperti kerja sama dalam pengawasan atau donasi tambahan. Ketika kepercayaan ini hilang, masyarakat cenderung tidak peduli terhadap perkembangan sekolah, yang justru memperburuk kondisi pendidikan di wilayah tersebut (Rismanda & Subandoro, 2021).

4. Pengaruh terhadap Moral dan Etika Pengelola Sekolah

Tidak hanya itu, penyalahgunaan dana juga menciptakan dampak negatif terhadap moralitas dan etika para pengelola sekolah. Ketika praktik-praktik seperti mark-up anggaran, proyek fiktif, atau penggelapan dana menjadi hal yang biasa, hal ini memberikan contoh buruk bagi siswa dan staf sekolah lainnya. Alih-alih mempraktikkan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas, para pengelola justru menunjukkan perilaku yang tidak patut dan bertentangan dengan tujuan pendidikan sebagai pembentuk karakter moral anak bangsa (Bahri, 2023).

5. Hambatan dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional

Terakhir, penyalahgunaan dana BOS menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pemerintah menetapkan alokasi dana BOS untuk mendukung berbagai program strategis, seperti menurunkan angka putus sekolah, meningkatkan kompetensi guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Namun, ketika dana ini disalahgunakan, semua target tersebut sulit dicapai, bahkan bisa mengalami kemunduran. Kondisi ini semakin memperburuk kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan daerah

tertinggal, yang pada akhirnya memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat (Lenggo et al., 2022).

Dampak penyalahgunaan dana BOS sangat luas dan mencakup berbagai aspek, mulai dari kerugian ekonomi, penurunan kualitas pendidikan, hingga hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan pengawasan, pelatihan transparansi kepada pengelola sekolah, dan pemberlakuan sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan. Dengan demikian, dana BOS dapat kembali berfungsi sebagai instrumen untuk memajukan pendidikan di Indonesia.

Simpulan

Artikel ini mengupas peran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia dan dampak buruk dari penyalahgunaannya. Dana BOS dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan pembebasan biaya bagi siswa kurang mampu, mendukung pemeliharaan fasilitas sekolah, serta meningkatkan kualitas pengajaran. Alokasi dana ini dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah berdasarkan prinsip transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

Namun, praktik penyalahgunaan dana BOS oleh oknum tertentu, termasuk tenaga pendidik dan administrasi sekolah, telah menciptakan berbagai permasalahan. Dana yang semestinya digunakan untuk pengadaan fasilitas pendidikan sering diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Manipulasi laporan keuangan, proyek fiktif, dan penyalahgunaan lainnya berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan, di mana siswa harus belajar dalam kondisi yang tidak memadai karena fasilitas sekolah tidak diperbaiki atau ditingkatkan sebagaimana mestinya.

Dampak lebih jauh dari penyalahgunaan dana BOS meliputi kerugian ekonomi yang dirasakan negara dan masyarakat. Pemerintah kehilangan anggaran yang telah dialokasikan, sementara orang tua siswa sering harus menanggung kekurangan fasilitas pendidikan. Selain itu, kasus-kasus seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan, mengurangi motivasi untuk mendukung program-program pendidikan, dan memberikan contoh buruk kepada siswa mengenai etika dan moral.

Kejadian ini juga menghambat pencapaian tujuan pendidikan nasional yang mencakup peningkatan akses pendidikan, pengembangan kompetensi guru, dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Akibatnya, kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal semakin lebar, memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pengawasan yang lebih ketat, pelatihan tentang transparansi dan akuntabilitas bagi pengelola sekolah, serta penerapan sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan.

Referensi

- Amelia, G., Panjaitan, J. K., & Irawan, R. (2023). Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. *De Juncto Delicti: Journal of Law*.
- Arifin, N. (2020). Pemikiran Pendidikan John Dewey. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 168–183.
- Astuti, W. U. R. I. (2017). Hakikat Pendidikan. *Over The Rim*, 191–199.
- Bahri, S. (2023). Analisis Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Ekonomi Masyarakat Desa Di Indonesia. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 281-295.
- Daulai, A. F. (2022). Hakikat Manusia dan Pendidikan. *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2).
- Hartanto, R. S. W., & Dani, H. (2020). Studi Literatur: pengembangan media pembelajaran dengan software autocad. *Jurnal Kajian Pendidikan Teknik Bangunan*, 6(1), 1–6.
- Hidayat, Y. (2019). Pendidikan dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 2(1).
- Hidayati, N. (2024). Analisis Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Penyalahgunaan Bantuan Dana BOS. *Jurnal Lawnesia (Jurnal Hukum Negara Indonesia)*, 3(2), 556–567.

- Julantika, T., Kurrohman, T., & Supatmoko, D. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 30-34.
- Lenggo, H. M., Bahri, S., & Maidin, R. (2022). Dampak bantuan dana operasional sekolah (BOS) terhadap keluarga miskin di Kecamatan Wolowaru Kabupaten Ende. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*.
- Marwah, S. S., Syafe'i, M., & Sumarna, E. (2018). Relevansi Konsep Pendidikan Menurut Ki Hadjar Dewantara dengan Pendidikan Islam. *Tarbawy: Indonesian Journal of Islamic Education*, 5(1), 14–26.
- Mauludi, D. R. (2023). Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dana BOS oleh Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Perspektif Kriminologi. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 119–143.
- Muryati, I. (2016). Pengelolaan Dana BOS pada SD Negeri di UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan Moyudan Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(2), 237–246.
- Rismanda, A. S., & Subandoro, A. (2021). Pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada sekolah swasta. *Economics and Sustainable Development*, 6(1), 43-43.
- Saputri, R.D.R. and Pratikno, A.S. 2024. Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*. 4, 2 (Aug. 2024), 340–347. DOI: <https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.481>.
- Septiana, A., Amin, I. I., Soebagyo, J., & Nuriadin, I. (2022). Studi Literatur: Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Dalam Pembelajaran Matematika. *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, 7(2), 343. <https://doi.org/10.25157/teorema.v7i2.7090>